



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOER ALI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 14113

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 445.000.000

1. Tanah Seluas 20000 m2 di KENDAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 126 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 151 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 33.297.689

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 626.197.689

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 626.197.689

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.